

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pola hubungan klientelisme masih mewarnai Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah Indonesia, seperti yang terjadi di Kota Tasikmalaya, kharismatik seorang Kyai dianggap mampu mempengaruhi partisipasi pemilih terutama di kalangan santri untuk mendukung partai Islam sehingga perolehan suara partai Islam mendominasi di Kota Tasikmalaya. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jawa Timur dari 19 daerah Kabupaten Kota 16 daerah dimenangkan oleh pasangan yang didukung oleh Kyai dan santri, Kyai memanfaatkan pola hubungan klientelisme yang dimilikinya untuk memenangkan calon tertentu dalam pilkada di Jawa Timur. Praktek-praktek seperti ini jika dibiarkan akan mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri. Sudah saatnya pola hubungan klientelisme digiring ke arah yang lebih positif misalnya hubungan patron klien dimanfaatkan tokoh untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkada.

Relasi klientelistik itu sendiri ditandai dengan adanya pola hubungan patron-klien. Kondisi ini terjadi ketika hubungan tokoh-tokoh lokal dengan masyarakatnya didasarkan pada klientelisme. Tokoh lokal menjadi patron bagi masyarakat yang diperlakukan sebagai kliennya, terutama dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Akibatnya masyarakat pun kehilangan rasionalitasnya dalam memilih karena sudah terikat oleh hutang budi kepada tokoh lokal yang memang dengan sengaja membantu kehidupan mereka (Asrinaldi, 2017:206).¹

¹Asrinaldi, 2017. *Politik masyarakat miskin kota*. Yogyakarta: Gava Media.

Hubungan patron-klien tergambar dari pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan *dyadic* (dua orang), hubungan tersebut melibatkan persahabatan instrumental dengan seorang dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam hal ini patron menyediakan perlindungan atau keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (klien). Pada gilirannya, klien membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada patron (Scott, 1972:92).

Lebih jauh, peneliti mengelaborasi perbedaan antara patronase dan klientelisme sebagai berikut : *Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung.* Sebaliknya, klientelisme merujuk pada *karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.* Klientelisme merupakan ‘relasi kekuasaan yang personalistik’ (Hutchcroft, 2014: 177), dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik. Hutchcroft, merujuk pada tulisan-tulisan sebelumnya, terutama Scott (1972), menekankan bahwa relasi klientelistik adalah relasi tatap muka secara langsung (*face to face*). Selanjutnya Hicken menjelaskan bahwa defenisi klientelisme setidaknya mengandung tiga hal. *Pertama*, kontingensi atau timbal-balik; ‘pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respons langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain’ (Hicken, 2011: 291). Biasanya, sumber-sumber material dipertukarkan dengan suara atau bentuk dukungan politik lainnya. *Kedua*, hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien. *Ketiga*, aspek pengulangan;

pertukaran klientelistik berlangsung secara terus-menerus (Aspinall & Sukmajati, 2015:4-5).

Konsep klientelisme akan menciptakan pola hubungan yang disebut dengan patron-klien², hal ini depertegas dengan pendapat Mackie, patron-klien adalah istilah yang langsung menunjuk pada hubungan mutualistik antara patron yang berkecukupan dan klien yang membutuhkan. Klientelisme ketika dikaitkan kepada ranah yang lebih khusus seperti pilkada, akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilihitu sendiri karena dapat memberikan peluang bagi patron untuk memobilisasi massa, dengan memanfaatkan kepatuhan klien akibat hutang budi klien terhadap sang patron. Hal ini dilakukan dengan cara mendukung arahan patron untuk berpartisipasi dalam pemilu ataupun mendukung langkah politik sang patron. Pola hubungan patron-klien ini sering dipraktekkan oleh penguasa birokrasi ataupun tokoh masyarakat salah satunya adalah Kyai.³

Berdasarkan kajian antropologis, Kyai adalah gelar agung yang diberikan masyarakat secara tulus karena kontribusinya dalam masyarakat dan mampu menjadi rujukan masyarakat atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, Kyai bukanlah gelar yang dikejar, melainkan gelar yang didapatkan. Berdasarkan hal itu, Kyai adalah seorang yang alim. Kata alim dalam kajian leksikologi berarti memahami suatu persoalan secara komprehensif, ia paham akan sesuatu secara menyeluruh. Dalam hal ini, Emha Ainun Najib mengatakan bahwa alim adalah *to understand*, mengerti dan tidak hanya sebatas mengetahui.

²Hubungan klientelisme disini tidak serumit yang dibayangkan karena hubungan kekuasaan yang terjadi dengan patron masih sebatas imbal jasa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di pesantren. Ini sangat jelas berbeda dengan pola relasi patron klien dalam konteks lebih umum;politisi bertindak sebagai agen yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan konstituen pemilih seperti penyediaan barang dan jasa serta lapangan pekerjaan

³Penyebutan gelar Kyai dalam penelitian ini peneliti sebut dengan Tuan Syekh disebabkan lokasi penelitian yang berbeda dan pada intinya kedua nama tersebut memiliki makna yang sama.

Jika derajat seseorang hanya pada taraf mengetahui, berarti ia baru bisa disebut arif atau *to know*. Hal itulah yang bisa menjadi pijakan bagi kita bersama untuk mengatakan bahwa seorang Kyai terlebih dalam masa pilkada seperti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati punya pandangan yang matang, punya keilmuan yang menyeluruh, serta punya kapasitas, kredibilitas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang mampuni (Ubaid, 2015:257).

Artinya, berdasarkan pemikiran di atas, wajar jika para Kyai mempunyai peranan dan pengaruh yang besar pada setiap lini kehidupan umat islam. Dalam relasi sosio-kultural umat islam di Indonesia, Kyai memiliki kedudukan dan posisi penting dalam membina dan menata kehidupan sesuai kapasitasnya sebagai pewaris para Nabi. Peran tersebut memberikan legitimasi kepada Kyai untuk melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat, yakni menjadi agen perubahan sosial dalam masyarakat. Melalui berbagai peran yang diembannya baik dalam bidang keagamaan dan bidang sosio-kultural, Kyai kemudian tampil sebagai patron yang memiliki kekuasaan hierarkis atas masyarakat. Ditinjau dari segi ilmu politik, Kyai merupakan aktor politik yang mempunyai sumber daya politik berbasis kharismatik dan tradisional yang memungkinkan Kyai membentuk sikap atau preferensi politis tertentu dalam struktur sosial masyarakat di sekitarnya.

Hal tersebut bisa tercermin dari kasus pemilihan kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia dalam hal ini kandidat kepala daerah beserta wakilnya sering mendatangi pondok pesantren untuk meminta restu politik sang Kyai untuk maju dalam pilkada di daerahnya. Selain itu, Kyai juga sering dimintai pendapatnya oleh kepala daerah dalam mengambil berbagai keputusan-keputusan penting dalam pemerintahannya. Restu maupun pendapat Kyai secara politis dimaknai

sebagai rujukan sah bagi kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya.

Kemampuan Kyai dalam membentuk sikap atau preferensi politis tertentu dalam struktur sosial masyarakat di sekitarnya dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya antara lain aktifitas politik yang dilakukan masyarakat desa Sukamulya salah satu daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di desa Sukamulya sebagai partai Islam selalu mendominasi pada setiap pelaksanaan pemilu selama pemerintahan Orde Baru, PPP selalu berada pada posisi perolehan suara tertinggi di kisaran angka 69.2 persen pada pelaksanaan pemilu tahun 1977, sementara Golongan karya hanya memperoleh 22.9 persen dan Partai Demokrasi Indonesia memperoleh 7.9 persen. Pada pelaksanaan pemilu berikutnya tahun 1982 PPP tetap memperoleh suara tertinggi sebanyak 62.1 persen meskipun menurun sedikit dari pemilu sebelumnya, sementara Golkar mengalami sedikit kenaikan dengan perolehan suara sebanyak 31.3 persen dan PDI hanya memperoleh 6.5 persen.

Kondisi ini membuat pemerintahan Orde Baru kurang nyaman, dan menilai desa Sukamulya merupakan salah satu wilayah yang membangkang terhadap pemerintahan Orde Baru. Hal ini dikarenakan masih kuatnya peran tokoh agama di wilayah tersebut yakni Kyai Haji Ahmad yang selalu mengarahkan warga untuk memilih partai berdasarkan nilai-nilai Islam seperti PPP karena hal tersebut sama dengan beribadah, ketokohnya dinilai oleh salah satu aktivis muda Astari dengan pernyataannya “Tidak ada satupun yang bisa membantah Kyai dalam hal agama, karena dia diberkahi oleh ilmu oleh karena itu kami mencintai dan mematuhi segala perintahnya” (Gaffar, 1988:253).

Penelitian ini dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru dengan pemilunya yang cenderung manipulatif dan penuh dengan intimidasi yang mengekang kebebasan individu dalam berpolitik, hal penting yang harus digarisbawahi meskipun dalam suasana pemilu pada masa Orde Baru Kyai memposisikan diri sebagai bagian dari PPP. Sementara penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah peran tokoh dalam pilkada dalam iklim demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan individu dalam berdemokrasi tanpa intervensi pihak ketiga dan tokoh agama dalam hal ini Tuan Syekh bukan bagian dari salah satu partai politik.

Yang kedua Penelitian yang menemukan bahwa peran Kyai yang memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk berinovasi tetapi di satu sisi jajarannya tetap merasa arahan Kyai lah sebagai penentu akhir, contohnya dalam pelaksanaan pemilu di lingkungan pesantren para santri berusaha mencari dukungan politik sang Kyai tetapi sang Kyai dengan tegas memberikan kebebasan memilih kepada para santrinya sesuai dengan pilihan masing-masing. Dengan kesimpulan bahwa tidak ada mobilisasi yang dilakukan oleh sang Kyai dalam rangka memenangkan calon tertentu (Nasakin dan Yani, 2014). Penelitian ini jelas menekankan bahwa tidak ada intervensi Kyai dalam memenangkan calon tertentu dalam pemilu dan penelitian ini cenderung mengkaji kepemimpinan Kyai dalam mengelola Pondok Pesantren.

Yang ketiga Penelitian yang terjadi di Kota Tasikmalaya yang menemukan bahwa Fanatisme masyarakat Tasikmalaya terhadap partai islam cenderung mengabaikan kualitas dan pendidikan calon. Hal menarik dari perilaku memilih

masyarakat Kota Tasikmalaya adalah ketika trend suara partai Islam cenderung terus menurun, maka hal sebaliknya terjadi di Kota Tasikmalaya.

Hal ini disebabkan adanya peran Kyai sebagai pemimpin keagamaan yang juga berafiliasi dengan partai politik, cenderung dapat menjaga kestabilan perolehan suara sebuah partai politik. Kyai merupakan tokoh masyarakat, pemimpin keagamaan yang dianggap mempunyai karisma sehingga dianggap mampu mempengaruhi perilaku memilih, terutama di kalangan santri. Karisma seorang Kyai dan statusnya di masyarakat membuat keberadaan Kyai dalam sebuah partai politik dianggap mampu menarik suara massa (Nurlatipah Nasir, 2015). Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih kuatnya pengaruh Kyai dalam mendulang suara dalam pemilu/pilkada yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah posisi Kyai yang tidak memosisikan diri-Nya sebagai partisipan salah satu partai politik atau non-partisipan.

Yang keempat Penelitian yang berlokasi di pesantren Roudlotun Nasyi'in Desa Berat Kulon Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa tingkat pengalaman politik santri sebagai pemilih pemula masih rendah apabila dibandingkan dengan pemilih secara umum, sehingga seringkali menimbulkan apatisme atau sikap acuh tak acuh terhadap proses politik khususnya pemilu. Disinilah dibutuhkan aktor yang mampu menumbuhkan orientasi politik dalam diri santri guna mengarahkan partisipasi politik santri dan dalam hal ini peneliti menempatkan peran Kyai, media dan orang tua sebagai faktor pendorong terciptanya pemilih rasional. Sehingga tidak hanya terfokus terhadap peran Kyai (Shofiya dan Yani, 2014). Beda penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah tentang peran Kyai sebagai tokoh yang

dihormati dan disegani oleh para santrinya tanpa melibatkan peran pihak yang lain dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada.

Yang kelima Penelitian yang berjudul Elite lokal berbasis Pesantren dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Di Jawa Timur dalam Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 363-381, dengan penulis Abdul Chalik, penelitian ini menggunakan teori Powercube, penelitian menyatakan bahwa elite lokal yang berbasis pesantren bersinergi dengan kekuatan politik, terutama dalam mendukung petahana yang bertarung mempertahankan kekuasaannya karena Pilkada Jatim merupakan area kontestasi elite lokal dalam memperebutkan ruang politik. Elite lokal yang banyak terlibat adalah elite lokal yang berbasis pesantren. Karena kapasitas, kharisma, dan *social capital* yang dimilikinya, elite lokal yang berbasis pe-santren memiliki nilai *bargaining* tinggi dalam mendukung seseorang dalam memperebutkan suara pemilih.

Kekuatan *incumbent* (petahana) di Jatim yang memenangkan Pilkada di 16 titik dari 19 daerah tidak dapat dilepaskan dari dukungan dari elite lokal, terutama Kiai dan santri. Kekuatan jaringan, pandangan, dan kerja sama yang saling menguntungkan merupakan salah satu sebab para elite mendukung petahana. Beberapa petahana juga berasal dari kalangan Kyai dan santri, sehingga mempermudah akses dalam menerobos jaringan politik hingga di level *grass root* (basis). Itulah yang menyebabkan kekuatan petahana dominan dalam Pilkada Jatim 2015.

Hasil penelitian di atas dengan tegas menyatakan keterlibatan Kyai dan santri dalam rangka memenangkan calon petahana, dan hal ini sangat berbeda dengan posisi Tuan Syekh yang hanya berperan meningkatkan partisipasi santrinya dan memberi

pemahaman betapa pentingnya menggunakan hak suara dalam memilih pemimpin dan arahan tersebut tanpa unsur intervensi kepada para santri.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka kajian ini hendak meneliti mengenai peran Tuan Bakri sebagai pimpinan Pesantren Mustafawiyah Purba Baru dalam mendorong partisipasi pemilih dalam pilkada khususnya yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal sebagai wilayah yang memiliki basis *nahdliyin* terbesar di Sumatera Utara. Penulis memilih Pesantren Mustafawiyah Purba Baru sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan jumlah santri yang banyak dan setiap tahun terus mengalami peningkatan, selain itu masih besarnya pengaruh tokoh agama dalam hal ini para Tuan Guru di hadapan para santrinya.

Melalui kajian ini Peneliti bisa menemukan pola hubungan antara patron dan klien dalam meningkatkan partisipasi pemilih terutama di Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Kajian tentang keterlibatan Pesantren dalam meningkatkan partisipasi pemilih belum banyak dan dinamika yang terjadi di wilayah Pesantren Mustafawiyah Purba Baru sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya notabene-nya memposisikan Kyai atau tokoh agama sebagai tokoh yang partisipan atau bagian dari salah satu partai politik dan posisi tersebut dimanfaatkan oleh Kyai untuk memobilisasi massa dalam rangka memenangkan suatu pemilihan, dan kondisi ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yang memfokuskan pentingnya memainkan peran Tuan Syekh untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada guna mensukseskan pesta demokrasi di tingkat lokal dengan kondisi kehidupan Pesantren Mustafawiyah Purba Baru yang penuh dengan nuansa hubungan klientelisme dalam bentuk pola hubungan patron klien.

Sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu sebagai besar tokoh agama dalam hal ini Kyai selalu memanfaatkan pola hubungan klientelistik tersebut untuk mendukung salah satu calon atau partai politik tertentu dalam ajang perebutan kekuasaan dalam pemerintahan. Tuan Syekh Pesantren Mustafawiyah Purba Baru dalam hal ini memainkan peran yang berbeda dalam memanfaatkan pola hubungan klientelistik tersebut, melalui pola hubungan klientelisme antara Tuan Syekh dan para santri dijadikan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan partisipasi pemilih santri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 tanpa adanya tujuan politik tertentu sehingga penelitian ini perlu dilakukan karena peneliti menilai ada kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang peran Kyai dalam ajang pilkada dan pemilu.

1.2. Perumusan Masalah

Pesantren Mustafawiyah Purba Baru merupakan salah satu Pesantren terbesar di wilayah Provinsi Sumatera Utara, ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah santri setiap tahun. Jumlah santri yang banyak tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon Bupati dan Wakil Bupati ataupun Partai Politik untuk membina hubungan baik dengan Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dalam rangka mendulang suara pada pelaksanaan pilkada atau pemilu di Kabupaten Mandailing Natal. Tabel 1 dapat dilihat pertambahannya.

Tabel 1 Rekapitulasi perbandingan jumlah Santri tahun pelajaran 2015/2016 M (1436/1437 H) dengan tahun pelajaran 2017/2018 M (1438/1439 H)

Kelas	2015/2016			2017/2018		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	1,545	708	2,253	1,753	777	2,530
II	1,332	694	2,026	1,345	602	1,947
III	1,241	780	2,021	1,314	639	1,953
IV	848	574	1,422	1,053	610	1,663
V	622	508	1,130	842	641	1,483
VI	446	357	803	643	433	1,076
VII	359	296	655	502	408	910
Jlh	6,393	3,917	10,310	7,452	4,110	11,562

Sumber : (Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru , 11 :2016 dan 05: 2018)

Dari Tabel di atas, terlihat jelas penambahan santri yang cukup signifikan, dimana jumlah santri pada tahun ajaran 2015/2016 M sebanyak 10.310, pada tahun ajaran 2017/2018 M mengalami peningkatan sebanyak 11.562, dari jumlah santri tersebut yang memiliki hak pilih dalam pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 sebanyak 1,574 pemilih santri, dengan jumlah santri yang cukup banyak tersebut kehidupan di Pesantren Mustafawiyah Purba Baru dapat diibaratkan sebuah Negara kecil, Tuan Bakri pimpinan Pesantren Mustafawiyah Purba Baru adalah tokoh yang mempunyai posisi yang strategis dan sentral dalam lingkungan pesantren. Posisi beliau itu terkait dengan kedudukannya sebagai orang terdidik dan kaya dalam khususnya dalam lingkungan pesantren. Dengan kekayaan yang dimilikinya Tuan Bakri menjadi patron kepada siapa santri bergantung,

posisi sentral Tuan Guru dapat dilihat dalam relasi klientelistik ini, terutama kalau relasi ini menghubungkan dan mengikat Tuan Bakri dengan para santri begitu juga kepada para pengajar di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

Sebelum membahas lebih lanjut, untuk memudahkan pemahaman pembaca demi menghindari kekaburan, berikut akan dibahas pengertian *Patronase* dan *klientelisme*. Pengertian dari kedua konsep tersebut layaknya banyak istilah lain dalam dunia ilmu sosial, pengertian kedua konsep tersebut sampai sejauh ini sebenarnya juga masih diperdebatkan. Beberapa ilmuwan sosial bahkan menyamakan kedua konsep tersebut, misalnya, Kitschelt dan Wilkinson, (2007:7) yang menyatakan pola relasi patron klien dalam konteks yang lebih umum; politisi bertindak sebagai agen yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan konstituen pemilih seperti kebijakan ekonomi, penyediaan barang dan jasa serta lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk memperjelas apa yang penulis maksudkan dengan istilah tersebut dengan merujuk kepada para ahli sebagai berikut.

Merujuk pada Shefter, penulis mendefinisikan patronase sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka (Shefter, 1994:283,; lihat juga Hutchcroft, 2014: 176-177 yang telah berupaya untuk membedakan kedua konsep tersebut). Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas

(misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang didanai oleh pemerintah). Meskipun demikian, penulis membedakan patronase dengan materi-materi yang bersifat programatik (*programmatic goods*), yaitu materi yang diterima oleh seseorang yang menjadi target dari program-program pemerintah, misalnya, program kartu pelayanan kesehatan yang menawarkan perawatan gratis untuk rakyat miskin.

Lebih jauh, peneliti mengelaborasi perbedaan antara patronase dan klientelisme sebagai berikut : *Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung.* Sebaliknya, klientelisme merujuk pada *karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.* Klientelisme merupakan ‘relasi kekuasaan yang personalistik’ (Hutchcroft, 2014: 177), dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik. Hutchcroft, merujuk pada tulisan-tulisan sebelumnya, terutama Scott (1972), menekankan bahwa relasi klientelistik adalah relasi tatap muka secara langsung (*face to face*).

Selanjutnya Hicken menjelaskan bahwa defenisi klientelisme setidaknya mengandung tiga hal. *Pertama*, kontingensi atau timbal-balik; ‘pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respons langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain’(Hicken 2011: 291). Biasanya, sumber-sumber material dipertukarkan dengan suara atau bentuk dukungan politik lainnya. *Kedua*, hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak

seimbang antara patron dengan klien. *Ketiga*, aspek pengulangan; pertukaran klientelistik berlangsung secara terus-menerus (Aspinall& Sukmajati, 2015:4-5).

Konsep klientelisme akan menciptakan pola hubungan yang disebut dengan patron-klien, hal ini depertegas dengan pendapat Mackie, patron-klien adalah istilah yang langsung menunjuk pada hubungan mutualistik antara patron yang berkecukupan dan klien yang membutuhkan, konsep patron-klien ini merujuk pada adanya hubungan saling ketergantungan antara patron dan klien yang terikat dengan kepentingan masing-masing. Patron mengharapkan adanya dukungan, loyalitas dan bantuan tenaga dari klien sehingga legitimasi yang dimilikinya semakin kuat. Sementara, klien mengharapkan perlindungan dan jaminan dari patron, terutama untuk memenuhi kepentingan mereka apakah pengakuan ataupun materi (Asrinaldi, 2017:193).

Hubungan Patron-Klien ini sangat terlihat di lingkungan pesantren, dimana keberadaan Kyai dengan posisinya sebagai elite agama, memiliki peran khas di pondok pesantren maupun di tengah-tengah masyarakat, yaitu sebagai pemimpin spiritual. Hubungan antara Kyai dengan santrinya bersifat emosional, dalam jarak yang dekat, membentuk hubungan bapak-anak, yang mana pemberi dan penerima nasehat mampu membentuk ikatan yang kukuh.

Pola hubungan seperti ini akan melahirkan sikap-sikap loyal dan kepatuhan yang tinggi kepada sang Kyai. Para santri melihat Kyai sebagai sosok manusia yang berilmu, pewaris nabi, contoh teladan dalam kehidupan, tempat bertanya, penolong lewat bantuan do'anya yang dianggap sebagai barokah dan bahkan mereka menganggap Kyai sebagai tumpuan semua persoalan dalam kehidupan. Terdapat dua pola hubungan antara Kyai dan Santri. *Pertama*, yaitu

pola hubungan antara pimpinan dan bawahan (*Patron-Client Relationship*).
Kedua, pola hubungan *laissez faire*, Yaitu pola hubungan Kyai santri yang tidak didasarkan pada tatanan organisasi yang jelas, semuanya didasarkan pada restu Kyai. Selama memperoleh restu dari sang Kyai, sebuah pekerjaan bisa dilaksanakan. Santri ikhlas menjalankannya dan berharap mendapatkan barakah dari Kyai (Amin Haedari, 2004:61).

Terdapat beberapa indikasi awal adanya keterkaitan Tuan Guru dan santri dalam proses politik, hal ini bisa dilihat dari adanya beberapa kunjungan pejabat Negara, para Bakal Calon Bupati dan Partai Politik ke lingkungan Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, seperti pertemuan Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Periode 2016-2021, Ivan Iskandar Batubara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru Tuan Mustafa Bakri di kediamannya, dengan maksud untuk menjadikan Tuan Mustafa Bakri sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dengan Ivan Iskandar Batubara, karena Tuan Mustafa Bakri dianggap masih memiliki nama baik dalam jejak politik dan sudah terbukti sukses dalam memimpin Pesantren Mustafawiyah. Sampai akhir masa pendaftaran calon di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal pasangan tersebut tidak mendaftar akibat tidak adanya respon yang positif dari Tuan Mustafa Bakri atas ajakan Ivan tersebut (beritasumut.com, hari Rabu, 29 April 2015).⁴

Indikasi kedua adalah Kunjungan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal nomor urut 3 Saparuddin Haji Lubis-Miswaruddin Daulay, Saparuddin Haji Lubis yang juga merupakan alumnus Pesantren

⁴. <https://beritasumut.com/Politik-Pemerintahan/IvanBatubara-Temui-Mudir-Musthafawiyah>. Diakses pada tanggal 29 April 2015.

Mustafawiyah Purba Baru melakukan silaturahmi dengan harapan Pesantren Mustafawiyah Purba Baru memberikan dukungan atas pencalonan dirinya. (mandailingonline.com, 24 November 2015).⁵ Dan yang terakhir kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, sekaligus meresmikan pembangunan gedung Asrama untuk santri Pesantren Mustafawiyah Purba Baru (redaksimedinas.com, 21 Juli 2017).⁶

Selain indikasi-indikasi tersebut, terjadinya tingkat partisipasi santri di Pesantren Mustafawiyah Purba Baru pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 yang cukup tinggi sebesar 71 % untuk lebih rinci perhitungan persentase partisipasi pemilih tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Jumlah Partisipasi Pemilih (*Voter Turnout*) santri Pesantren Musthafawiyah Pura Baru Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015

Pemilih santri dan santriwati			
Jenis Pemilihan	Jumlah Pemilih	Jumlah pengguna hak pilih	Persentase (%)
Pilkada Kab. Madina 2015	1.574	1.138	71 %

Sumber : (KPU Kabupaten Mandailing Natal, 10: 2017)

Berdasarkan indikasi-indikasi di atas, serta angka partisipasi pemilih santri Pesantren Musthafawiyah Pura Baru Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015 yang cukup tinggi. Tingkat partisipasi santri yang cukup signifikan tersebut diasumsikan para Tuan Guru berperan dalam

⁵. <http://www.mandailingonline.com/saparuddin-haji-lubis-berlatar-santri/>. Diakses pada tanggal 24 November 2015.

⁶. <https://www.redaksimedinas.com/pembangunan-asrama-putri-ponpes-musthafawiyah-purba-baru-mencapai-30-persen/>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2017.

mendorong partisipasi pemilih di lingkungan Pesantren Mustafawiyah Purba Baru tanpa adanya unsur intervensi terhadap pilihan pemilih santri. Pandangan ini muncul karena pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal 2015 setiap pasangan calon memperoleh suara di wilayah Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Untuk lebih jelasnya Gambaran tingkat partisipasi perolehan suara setiap calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal 2015 di wilayah Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, kita bisa melihat tabel perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon di bawah ini.

Tabel 3 Perbandingan Perolehan Suara oleh Masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mandailing Natal 2015

Nama Pasangan Calon	Jumlah akhir
Drs. H. M. Yusuf Nasution, Msi dan H.M. Imron Lubis, SPd.MM	106
Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution	1.560
Saparuddin Haji dan M. Miswaruddin Daulay, S.pd	304
Jumlah suara sah calon	1.970

Sumber : (KPU Kabupaten Mandailing Natal, 10: 2017)

Dari hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal 2015 dalam tabel tersebut di atas, santri yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai berikut :

Tabel 4 Jumlah pemilih santri di Pesantren Mustafawiyah Purba Baru pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal 2015

Jenis Kelamin	Jumlah Pemilih	Jumlah pengguna hak pilih	Jumlah yang tidak menggunakan hak pilih
Laki-laki	794	388	406
Perempuan	777	730	47
Jumlah	1,571	1,118	453

Sumber : (KPU Kabupaten Mandailing Natal, 04: 2018)

Kondisi tersebut diatas menunjukkan partisipasi pemilih yang cukup tinggi, hal ini terjadi karena adanya sosialisasi yang cukup gencar dari para Tuan Guru kepada para santri untuk ikut berpartisipasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal 2015 sebagai perpanjangan tangan Tuan Bakri yang memiliki basis massa nyata yaitu para santri dan menyarankan para santrinya untuk memilih pada hari pemungutan suara. Keberadaan Tuan Guru sebagai tokoh yang dihormati dan dipatuhi akibat jasanya yang telah memberikan taulan dan ilmu kepada para santrinya, serta posisinya yang dianggap sebagai pewaris para nabi, mengharuskan para santrinya untuk patuh kepada arahan sang Tuan Guru. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana peran yang dimainkan oleh para Tuan Guru dalam meningkatkan partisipasi pemilih santri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015. Penelitian ini bermaksud membuktikan asumsi tersebut. Dengan demikian fokus penelitian ini adalah Peran Tuan Syekh Pesantren Mustafawiyah Purba Baru dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

Bagaimana peran Tuan Syekh Pesantren Mustafawiyah Purba Baru dalam meningkatkan partisipasi pemilih di pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mendiskripsikan peran Tuan Syekh Pesantren Mustafawiyah Purba Baru dalam mendorong partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Pesantren Mustafawiyah Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap ilmu pengetahuan terkait tentang study tentang klientelisme dan partisipasi pemilih terhadap penelitian berikutnya, peneliti mengharapkan penelitian ini memberikan beberapa manfaat, diantaranya :

1.4.1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pengembangan ilmu baru terutama kajian tentang klientelisme dalam politik dimana pola hubungan Patron-Klien dimaknai hubungan antara individu yang memiliki status ekonomi, dan pengetahuan yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya untuk menyediakan perlindungan dan atau keuntungan bagi seseorang dengan status yang lebih rendah (klien). Pada gilirannya klien membalasnya dengan menawarkan dukungan serta jasa pribadi dan loyalitas kepada patron tadi. Pola hubungan seperti ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat yang bersifat rasional, dengan

menjadikan peran Kyai sebagai tokoh yang kharismatik dan dipatuhi dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan dan masukan bagi pemangku kepentingan tentang pentingnya peran tokoh kharismatik dalam peningkatan partisipasi pemilih khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

